

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KOTA LANGSA
TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**REKHA ANJELI
Nim. 4022018006**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2024 M / 1445 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KOTA LANGSA
TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

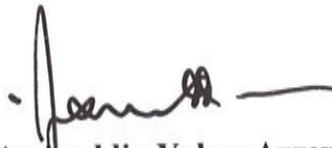
Diajukan oleh:

REKHA ANJELI
Nim. 4022018006

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 30 Januari 2024

Pembimbing I



Dr. Amruddin Yahya Azzawy, M. Pd.
Nip. 19750909 200801 1 013

Pembimbing II



Mastura, M.E.I
NIDN. 20130787701

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Chahayu Astina, M.Si
NIP. 19841123 201903 2 007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KOTA LANGSA TERHADAP PENANGGULANG KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” Nama Rekha Anjely, NIM.4022018006 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 19 Februari 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.

Langsa, 19 Februari 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

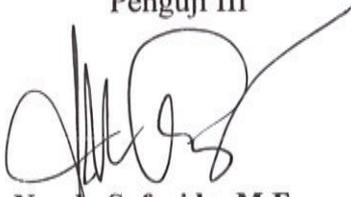
Penguji I


Chahayu Astina, M.Si
NIP. 19841123 201903 2 007

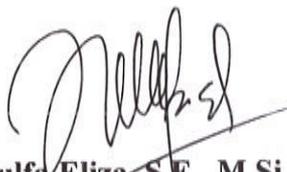
Penguji II


Mastura, M.E.I
NIP. 19870713 202321 2 034

Penguji III


Nanda Safarida, M.E
NIP. 19831112 201903 2 005

Penguji IV


Zulfa Eliza, S.E., M.Si
NIP. 19850403 202321 2 043

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 198202052007101001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rekha Anjeli
NIM : 4022018006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KOTA LANGSA
TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini benar-benar saya kerjakan sendiri. Skripsi ini bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan Skripsi saya secara orisinal dan otentik.

Bila kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara dakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan saksi terberat berupa pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak maupun dami menegakan integritas akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

Langsa, 16 Januari 2024

Yang Menyatakan;



(REKHA ANJELI)

MOTTO

Setiap apa yang kita kerjakan akan menjadi bagian besar dari hidup kita. Satu-satunya jalan untuk benar-benar puas adalah dengan bekerja keras. Dan satu-satunya jalan untuk bisa bekerja keras adalah mencintai apa yang kita kerjakan. Jika kita belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan berhenti. Karena dengan menggunakan hati, kita akan tahu saat kita menemukannya.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa terhadap penanggulangan kemiskinan menurut perspektif Ekonomi Islam. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Instrument pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan *key person* dalam penelitian ini adalah Staf kantor, Pendamping PKH, Staf Tetap Kantor Dinas Sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa adalah berupa Program Keluarga Harapan (PKH), BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), PIP (Program Indonesia Pintar), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Program-program tersebut dicairkan dengan prosedur masing-masing. Selain itu yang menjadi kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial harus mempunyai identitas yang jelas dan berdomisili di Langsa, keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dan terendah di daerah pelaksanaan. (2) Upaya pemerintah untuk keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa adalah melakukan upaya transparansi terkait informasi yang diberikan kepada masyarakat dan akuntabilitas dimana pemerintah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak program bantuan sosial agar pemerintah dapat mengukur efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Sedangkan (3) efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa terhadap penanggulangan kemiskinan menurut perspektif Ekonomi Islam ialah belum memenuhi syarat keadilan dimana masih terdapat kendala dalam penyaluran bagi masyarakat/calon penerima bantuan sehingga berdampak tidak pemerataan dalam penyaluran bantuan.

Kata Kunci: Efektivitas Program Bantuan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze and explain the effectiveness of the social assistance program in Langsa City towards poverty alleviation according to an Islamic Economics perspective. The form of this research is qualitative research. The type of research used is field research. Data collection instruments use observation, interview and documentation techniques. The key person informants in this research are office staff, PKH assistants, permanent staff at the Social Service Office. The results of this research show that (1) the forms of social assistance programs in overcoming poverty in Langsa City are the Family Hope Program (PKH), BLTDD (Village Fund Direct Cash Assistance), PIP (Smart Indonesia Program), Non-Cash Food Assistance (BPNT).) Basic food and JKN (National Health Insurance). These programs are disbursed according to their respective procedures. Apart from that, the criteria for people who are entitled to receive social assistance must have a clear identity and be domiciled in Langsa, families with low to middle and lowest economic conditions in the implementation area. (2) The government's efforts to ensure the success of the social assistance program in alleviating poverty in Langsa City is to make efforts for transparency regarding the information provided to the community and accountability where the government carries out its obligations and responsibilities for every action and decision taken. Furthermore, the government carries out regular evaluations of the impact of social assistance programs so that the government can measure its effectiveness and make improvements if necessary. Meanwhile (3) the effectiveness of the social assistance program in Langsa City in alleviating poverty according to an Islamic Economics perspective is that it does not meet the requirements of justice, where there are still obstacles in distribution to the community/potential recipients of aid, resulting in unequal distribution of aid.

Keywords: Effectiveness of Social Assistance Programs, Poverty Alleviation, Islamic Economics

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.TH., M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Ibu Chahayu Astina, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Dr. Amiruddin Yahya azzawy, M. Pd. selaku pembimbing pertama yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Ibuk Mastura, M.E.I selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

6. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
7. Ucapan terimakasih yang tiada tara untuk Ayahanda Ibunda yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan dukungan, nasehat, cinta, perhatian, dan juga kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena untuk kalian berdua.
8. Saudara kandung, kedua kakak saya dan abang saya terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta doanya.. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan yang besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada sahabat terbaik segala-galanya, penasehat nomer satu.
10. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, Februari 2024

Penulis,

Rekha Anjeli

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُوم = *al-‘ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت = *al-bayt*),
(السَّمَاء = *al-samā'*).

6. *Tā'* *marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā'* *marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوْيَةُ الْهِلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوْيَةُ = *ru'yah*), (فُقُهَاء = *fuqahā'*).
8. Penulisan kata pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
9. Huruf kapital walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
10. Tajwid untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

COVER	
PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIASI	
MOTTO	i
ABSTRAKSI (Bahasa)	ii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Penjelasan Istilah	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1. Efektivitas.....	12
2.1.1. Pengertian Efektivitas	12
2.1.2. Ukuran Efektivitas.	12
2.1.3. Pendekatan Efektivitas.....	14
2.2. Bantuan Sosial.....	16
2.2.1. Pengertian Bantuan Sosial.....	16
2.2.2. Program Bantuan Sosial.....	18
2.2.3. Jenis-Jenis Bantuan Sosial.....	19
2.3. Kemiskinan.....	20
2.3.1. Pengertian Kemiskinan.....	20
2.3.2. Bentuk Kemiskinan.....	21
2.3.3. Penyebab Kemiskinan.....	22
2.3.4. Program Penanggulangan Kemiskinan.....	23
2.3.5. Upaya Pementasan Penanggulangan Kemiskinan.....	25
2.4. Ekonomi Islam	26
2.4.1. Pengertian Ekonomi Islam.....	26
2.4.2. Sumber-Sumber Ekonomi Islam.....	29
2.4.3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	30

2.4.4. Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	31
2.5. Penelitian Terdahulu.....	34
2.6. Kerangka Teoritis.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	44
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3.3. Subjek Penelitian.....	45
3.4. Sumber Data.....	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6. Metode Keabsahan Data.....	48
3.7. Analisis Data.....	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Objek Penelitian.....	52
4.2. Hasil Penelitian.....	54
4.3. Pembahasan.....	67
BAB V : PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dimana taraf hidup masyarakat didasarkan pada tingkat minimum yang didapatkan. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah global yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang. Islam memandang kemiskinan sebagai ancaman dari setan bahkan kemiskinan dapat menjadi salah satu sebab kemunduran dan kehancuran suatu bangsa.¹

Jika membicarakan mengenai kemiskinan, tentunya mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu harus memberikan upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin. Agar tingkat kemiskinan dapat diminimalisir, maka pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan.²

Pemerintah telah melaksanakan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan

¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT. Rafika, 2014), h. 86.

² Sajogyo, *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan* (Yogyakarta: Adytia Media, 2016), h. 112.

pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.³

Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan seperti akses kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Kompleksitas kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengertian dan dimensi saja namun berkaitan juga dengan metode yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan.

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contoh bantuan langsung tunai (BLT), raskin, PKH, BBM. sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh program jamkesmas, program IDT, BOS.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di kantor Dinas Sosial Kota Langsa bahwa bentuk program bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dalam

³ Nunung Nuewati, "*Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*". Jurnal (Kependudukan Padjadjaran 2018 Vol. 10, No. 1), h. 2.

menanggulangi kemiskinan diantaranya adalah bantuan dalam bentuk PKH, BLTDD, PIP, BPNT dan JKN.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nursiah salah satu masyarakat Kota Langsa menyatakan:

“Saya seorang janda dan tinggal sendiri di rumah, sehari-hari saya berjualan kue Aceh, hasil jualan untuk biaya hidup saya kadang pun tidak cukup. Akan tetapi dengan bantuan pemerintah yang diberikan kepada saya berupa bantuan PKH sangat membantu ekonomi saya. Walaupun tidak saya peroleh setiap bulan, akan tetapi bisa meringankan ekonomi hidup saya”.⁵

Tahun 2020 masyarakat Langsa yang terdaftar menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), PIP (Program Indonesia Pintar), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dari Kemensos RI sebanyak 4.771 kepala keluarga (KK). Penerima bantuan sosial untuk 55 gampong di lima kecamatan dalam wilayah Kota Langsa dengan jumlah total penerima 4.771 KK, yang diinput dari Kordinator bantuan sosial Kota Langsa.

Menurut BPS tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kota Langsa sebesar 10,96%, angka ini terus meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Langsa Kota maka pemerintah menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), PIP (Program Indonesia Pintar), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diharapkan mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah ini.

⁴ Hasil observasi peneliti di kantor Dinas Sosial Kota Langsa

⁵ Hasil wawancara dengan Nursiah salah satu masyarakat Kota Langsa.

Selain itu Kecamatan Langsa Kota merupakan wilayah yang memiliki sinyal kuat atau wilayah online, karena dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), PIP (Program Indonesia Pintar), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sekarang sudah menggunakan sistem non tunai di bank penyalurnya, jadi hal ini tentunya menjadikan faktor dalam penyaluran bantuan sosial serta memudahkan para keluarga penerima manfaat dalam mencairkan bantuan yang diperolehnya.

Program Keluarga Harapan (PKH), BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), PIP (Program Indonesia Pintar), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang ada di Kota Langsa adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dan bagi anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, seperti PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup sebagai salah satu program pengetasan kemiskinan yang digulirkan oleh kementrian sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program

bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan.⁶

Berdasarkan hasil observasi peneliti, di Kota Langsa tidak semua masyarakat yang berhak untuk memperoleh bantuan mendapatkan bantuan tersebut. Banyak masyarakat yang seharusnya memang layak untuk diberikan bantuan sosial oleh pemerintah akan tetapi mereka sama sekali tidak mendapatkannya, malah orang yang cukup dan tidak layak mendapatkan bantuan sosial tersebut mendapatkannya.⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan M.daud masyarakat Kota Langsa menyatakan:

“Saya seorang duda dengan 1 orang anak, saya kerja sebagai tukang bersih di rumah orang. Saya selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan apapun padahal tetangga saya yang bercukupan memperoleh bantuan seperti bantuan BLT, PKH dan lain sebagainya”.⁸

Islam sangat memperhatikan masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu konsep untuk memberantas kemiskinan adalah dengan berusaha dan bekerja keras. Penanggulangan kemiskinan yang pernah dilakukan sebelumnya hanya bersifat jangka pendek. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat pemerintah tetapi kemudian ternyata tidak mampu sepenuhnya mengatasi masalah kemiskinan. Seharusnya program-program yang diberikan kepada masyarakat haruslah program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti memperbaiki pendidikan dan kesehatan, karena untuk keluar dari lingkaran kemiskinan jalan satu-satunya dapat diwujudkan jika masyarakat itu sehat dan

⁶ Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin”. Jurnal (Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, 2023. h. 32.

⁷ Hasil observasi peneliti, di Kota Langsa.

⁸ Hasil wawancara dengan M.daud masyarakat Kota Langsa.

cerdas. Jika masyarakat sehat dan cerdas maka masyarakat itu dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan, segala upaya dilakukan oleh pemerintah. Salah satu program pemerintah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin adalah dengan memberikan bantuan sosial (BANSOS). Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁹

Pemerintah Kota Langsa dalam melaksanakan program dalam masalah pemberian bantuan sosial yang langsung ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan, pasti ada kekurangannya, apalagi di saat ini, yang tentunya semua masyarakat tanpa terkecuali merasakan adanya kekurangan. Dalam pelaksanaan bantuan sosial (BANSOS) dalam bentuk uang atau sembako belum efektif karena belum ada pemerataan dan belum tepat sasaran dalam pemberian bantuan tersebut. Sehingga perlu adanya efektivitas pelaksanaan bantuan sosial (BANSOS) dalam suatu program yang dapat dinilai sejauh mana peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dilaksanakannya program bantuan tersebut. Maka dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Bantuan Sosial di Kota Langsa terhadap Penanggulangan Kemiskinan menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

⁹ Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h.70.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa terhadap penanggulangan kemiskinan.
2. Penyaluran dana bantuan sosial di Kota Langsa belum tepat sasaran.
3. Kurang efektifnya pemerintah desa dalam mengelola penerima bantuan sosial di Kota Langsa.

1.3. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian dengan bentuk program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa berupa PKH, BLTDD, PIP, BPNT dan JKN.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang berupa:

1. Apa saja bentuk program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa?
2. Bagaimana efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa terhadap penanggulangan kemiskinan menurut perspektif ekonomi Islam?

3. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa.
- b. Untuk mengetahui efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa terhadap penanggulangan kemiskinan menurut perspektif ekonomi Islam.
- c. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori mengenai efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa terhadap penanggulangan kemiskinan.
- b. Secara Praktis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai pemikiran bagi dunia hukum dan masyarakat.

2. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang ekonomi syariah mengenai efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa terhadap penanggulangan kemiskinan menurut perspektif ekonomi Islam.
3. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti yang lain apabila ingin meneliti tema yang sama namun dengan fokus yang berbeda.

1.6. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dari pemahaman yang berbeda oleh para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul proposal skripsi ini perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan.¹⁰
2. Bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹
3. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan

¹⁰ Asnawi, *Efektifitas Penyelenggaraan Publik* (Jakarta: Media Massa, 2013), h. 6.

¹¹ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia* (Bandung: Fokus Media 2012), h. 2.

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

4. Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang beradadidalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹²

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan metode penulisan.

¹² M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 121.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga menguraikan tentang bentuk program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa, efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa terhadap penanggulangan kemiskinan menurut perspektif ekonomi Islam dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang ditetapkan berlandaskan pada teori-teori yang ada dan penelitian terdahulu sehingga memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

Ketentuan mengenai bansos diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut Undang-Undang tersebut, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pengertian ini juga dijelaskan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Selain itu, ketentuan yang mengatur BANSOS yaitu tentang Pengelolaan bansos tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Aturan ini mencabut Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁵⁴

Saat ini Kementerian Sosial melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 (2) yang menyebutkan bahwa Data Terpadu yg telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau

⁵⁴ <https://sidomoro.kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/111/90>

pemberdayaan sosial. Adapun program bantuan sosial yg sudah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diantaranya Program Sembako, PKH dan PBI-JK. Selain pengadaan bantuan reguler seperti berbagai program tersebut di atas, adapula bantuan sosial yang sifatnya insidental. Dikatakan insidental karena memang sifatnya hanya sementara saja, yang mana biasanya bilamana ada kejadian khusus seperti bencana alam ataupun kejadian luar biasa. Untuk yang masuk dalam kategori bantuan sosial insidental ini diantaranya adalah bantuan sosial bagi mereka yang ekonominya terdampak oleh pandemi covid 19 seperti kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sebagai contoh nyata adalah KKS Sembako PPKM, BST dari kementrian, serta BLT DD dari Kemendesa.⁵⁵

Tabel 4.1

Deskripsi Informan/Responden

No	Nama	Jabatan Informan	Tamatan	Jenis Kelamin
1	Munawir	Staf Kantor Dinas Sosial	S1	34 Tahun
2	Audia Mahdong	Pendamping PKH	S1	30 Tahun
3	Nurul Fazri	Staf Tetap	S1	29 Tahun
4	Juliani	Masyarakat	SMP	34 Tahun
5	Ngatiem	Masyarakat	SMP	32 Tahun
6	Abdul Kadir	Masyarakat	SMA	30 Tahun
7	Rumiyanti	Masyarakat	SMA	30 Tahun
8	Latifah	Masyarakat	SMA	29 Tahun

⁵⁵ <https://sidomoro.kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/111/90>

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Bentuk Program Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa

Program bantuan sosial memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di berbagai negara. Bentuk program bantuan sosial dapat bervariasi, tetapi umumnya bertujuan untuk memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Salah satu bentuk program yang umum adalah bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin. Dalam program ini, pemerintah memberikan bantuan finansial secara periodik kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti tingkat pendapatan di bawah batas kemiskinan. Bantuan tunai ini dapat digunakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, program bantuan sosial juga dapat mencakup bantuan non tunai, seperti subsidi harga barang-barang pokok atau layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin.

Selain itu, program bantuan sosial juga dapat dirancang untuk memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja. Program ini tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga berusaha untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian, bentuk-bentuk program bantuan sosial ini mencerminkan pendekatan holistik dalam penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pada

pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan perubahan struktural yang lebih berkelanjutan. Keberhasilan program bantuan sosial sering kali bergantung pada perencanaan yang matang, implementasi yang efisien, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Munawir Staf Kantor Dinas Sosial Kota Langsa menyatakan bahwa:

“Bentuk program bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan diantaranya dengan memberikan atau menyalurkan bantuan berupa PKH, BLTDD, PIP, BPNT dan JKN. Program-program tersebut dicairkan dengan prosedur masing-masing diantaranya jika penerima PKH diambil menggunakan kartu dan dapat dicairkan sendiri. Selanjutnya jika BPNT jika yang memperoleh uang secara tunai maka akan digantikan dengan bahan pangan pokok. Selain itu yang menjadi kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial harus berdomisili di Langsa, keluarga dengan kondisi ekonomi 25% dan terendah di daerah pelaksanaan”.⁵⁶

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah mengimplementasikan berbagai bentuk program bantuan sosial seperti PKH, BLTDD, PIP, BPNT dan JKN. Sistem penyaluran bantuan ini memiliki prosedur yang berbeda-beda, menciptakan cara yang efektif untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai contoh, Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kartu untuk pencairan, memungkinkan penerima untuk secara mandiri mengakses bantuan tersebut. Selain itu, dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penerima yang menerima uang secara tunai dapat menggantinya dengan bahan pangan pokok.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Munawir Staf Kantor Dinas Sosial Kota Langsa pada 21 Desember 2023.

Kriteria penerima bantuan sosial juga menjadi faktor penting, dengan persyaratan termasuk berdomisili di Langsa, memiliki kondisi ekonomi dalam 25% terendah di daerah pelaksanaan program. Dengan demikian, melalui berbagai bentuk program ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan, sambil memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam proses penanggulangan kemiskinan.

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Audia Mahdong Pendamping PKH Dinas Sosial Kota Langsa menjelaskan bahwa:

“Bentuk program bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan diantaranya dengan memberikan atau menyalurkan bantuan berupa PKH, BLTDD, PIP, BPNT dan JKN. Sedangkan yang menjadi kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial harus berdomisili di Langsa, keluarga dengan kondisi ekonomi 25% dan terendah di daerah pelaksanaan”.⁵⁷

Selanjutnya Nurul Fazri Staf Tetap Dinas Sosial Kota Langsa juga menjelaskan bahwa:

“Bentuk program bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan diantaranya dengan memberikan atau menyalurkan bantuan berupa PKH, BLTDD, PIP, BPNT dan JKN. Sedangkan yang menjadi kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial harus mempunyai identitas yang jelas dan berdomisili di Kota Langsa dan juga harus mempunyai surat keterangan miskin”.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Audia Mahdong Pendamping PKH Dinas Sosial Kota Langsa pada 21 Desember 2023.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Nurul Fazri Staf Tetap Dinas Sosial Kota Langsa pada 21 Desember 2023.

Pernyataan terkait bentuk program bantuan sosial, Juliani masyarakat Kota Langsa menyatakan bahwa:

“Selama ini saya menerima bantuan sosial berupa PKH, bantuan ini saya terima dalam 1 bulan sebanyak satu kali. Bantuan ini saya gunakan untuk keperluan sekolah dan kebutuhan keluarga. Alhamdulillah juga sangat membantu saya sekali dimana saya termasuk keluarga yang tidak mampu”.⁵⁹

Selanjutnya Ngatiem juga menyatakan bahwa:

“ Saya menerima bantuan sosial dalam bentuk bantuan BPNT dan bantuan lansia. Dalam 1 bulan saya menerimanya sebanyak 1 kali”.⁶⁰

Selain itu, Abdul Kadir juga menuturkan bahwa:

“Saya menerima bantuan sosial berupa bantuan lansia dan rehabilitas. Akan tetapi saya menerimanya sebanyak dua kali dalam satu tahun”. Ya walaupun begitu itu sangat bermanfaat bagi saya”.⁶¹

Ramiyati dan Latifah masyarakat Kota Langsa juga menuturkan bahwa:

“Selama ini kami menerima bantuan sosial berupa PKH, bantuan ini kami terima dalam 1 bulan sebanyak satu kali. Bantuan ini sangat membantu dan bermanfaat dimana kami gunakan untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan anak balita kami”.⁶²

Secara keseluruhan, berbagai bentuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), PIP (Program Indonesia Pintar), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) telah membentuk fondasi yang

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Juliani masyarakat Kota Langsa pada 05 Januari 2024.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ngatiem masyarakat Kota Langsa pada 05 Januari 2024.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Abdul Kadir masyarakat Kota Langsa pada 05 Januari 2024.

⁶² Hasil wawancara dengan Ramiyati dan Latifah masyarakat Kota Langsa pada 05 Januari 2024.

kuat dalam upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Penyaluran bantuan ini tidak hanya didasarkan pada kriteria ekonomi, tetapi juga memperhatikan identitas yang jelas dan domisili di Kota Langsa, serta persyaratan surat keterangan miskin. Hal ini menciptakan pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan bahwa bantuan sosial mencapai masyarakat yang membutuhkan dengan tepat, sambil menghindari penyaluran yang tidak efektif. Dengan mengintegrasikan berbagai program ini, pemerintah dapat lebih efisien dalam merespons kebutuhan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan, sambil memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal.

Bentuk bantuan sosial di Kota Langsa dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.2

No	Jenis Bantuan	Sumber
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Anggaran Pemerintah
2	BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Alokasi Dana Desa
3	PIP (Program Indonesia Pintar)	Dari pemerintah melalui APBN
4	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako	Dana anggaran pemerintah
5	JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)	Iuran peserta dan subsidi dari pemerintah

Sumber: Wawancara 2023

Dapat disimpulkan, bentuk program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa adalah berupa PKH, BLTDD, PIP, BPNT dan JKN. Program-program tersebut dicairkan dengan prosedur masing-masing. Selain itu yang menjadi kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial harus mempunyai identitas yang jelas dan berdomisili di Langsa, keluarga dengan kondisi ekonomi 25% dan terendah di daerah pelaksanaan.

4.2.2. Efektivitas Program Bantuan Sosial di Kota Langsa terhadap Penanggulangan Kemiskinan menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, efektivitas program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan dipandang sebagai aspek yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan ekonomi. Program bantuan sosial diarahkan untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Ekonomi Islam menekankan pentingnya sadaqah sebagai instrumen bantuan sosial yang mendorong konsep kepedulian sosial dan saling membantu di antara anggota masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas program bantuan sosial tidak hanya diukur dari segi dampak ekonomi, tetapi juga dari perspektif moral dan spiritual. Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kesejahteraan materiil tetapi juga membangun solidaritas sosial, memperkuat ikatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, efektivitas program bantuan sosial dalam konteks ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan pengurangan kemiskinan secara materiil, tetapi juga dengan terwujudnya prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat.

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Terkait efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa terhadap penanggulangan kemiskinan, Munawir Staf Kantor Dinas Sosial Kota Langsa menyatakan bahwa:

“Dalam program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa sudah jelas tujuan yang dicapai, di mana bantuan sosial di salurkan kepada penerima yang berhak mendapatkannya”.⁶³

b. Kejelasan Strategi

Kejelasan strategi adalah langkah-langkah atau rencana tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Munawir Staf Kantor Dinas Sosial Kota Langsa menyatakan bahwa:

“Dalam program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa sudah jelas strategi yang dilakukan dalam penyaluran bantuan di salurkan kepada penerima yang berhak mendapatkannya”.⁶⁴

Nurul Fazri Staf Tetap Dinas Sosial Kota Langsa juga menjelaskan bahwa:

“Program bantuan sosial sudah efektif, dimana sudah ada kejelasan tujuan yang hendak dicapai, sudah ada kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan, sudah ada proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, sudah ada perencanaan yang matang, sudah menyusun program yang tepat dan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sudah efektif dan efisien. Akan tetapi masih juga terdapat kendala dalam penyaluran dimana masyarakat/calon penerima bantuan ada yang merasa yang berhak mendapatkan tapi mereka tidak mendapatkan bantuan. Hal ini terjadi karena data yang diberikan tidak valid. Selain itu respon penerima

⁶³ Hasil wawancara dengan Munawir Staf Kantor Dinas Sosial Kota Langsa pada 21 Desember 2023.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Munawir Staf Kantor Dinas Sosial Kota Langsa pada 21 Desember 2023

bantuan kurang sportif. Sehingga berdampak tidak merata dan adil dalam mendapatkan bantuan”.⁶⁵

c. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

“Sejauh ini program bantuan sosial sudah efektif, dimana sebelum bantuan disalurkan data calon penerima harus diverifikasi melalui BPNPA. Akan tetapi masih juga terdapat kendala dalam penyaluran dimana masyarakat/calon penerima bantuan ada yang merasa yang berhak mendapatkan tapi mereka tidak mendapatkan bantuan. Hal ini terjadi karena data yang diberikan tidak valid. Selain itu respon penerima bantuan kurang sportif”.⁶⁶

Audia Mahdong Pendamping PKH Dinas Sosial Kota Langsa menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini program bantuan sosial sudah efektif, dimana sudah ada kejelasan tujuan yang hendak dicapai, sudah ada kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan, sudah ada proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, sudah ada perencanaan yang matang, sudah menyusun program yang tepat dan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sudah efektif dan efisien”.⁶⁷

Program bantuan sosial telah mencapai tingkat efektivitas yang memuaskan. Kejelasan tujuan, strategi pencapaian, analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, serta perencanaan yang matang memberikan dasar yang kokoh bagi kesuksesan program ini. Pemilihan program yang tepat dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang efektif dan efisien memberikan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Nurul Fazri Staf Tetap Dinas Sosial Kota Langsa pada 21 Desember 2023.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Munawir Staf Kantor Dinas Sosial Kota Langsa pada 21 Desember 2023.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Audia Mahdong Pendamping PKH Dinas Sosial Kota Langsa pada 21 Desember 2023.

dampak positif pada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, dapat diakui bahwa upaya pemerintah dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola program bantuan sosial telah memberikan kontribusi signifikan dalam penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi disparitas sosial di dalamnya.

Dalam Islam kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah masalah yang serius yang perlu diberikan perhatian secara serius pula. Oleh karena itu, Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini secara detail, baik aspek konsepsi maupun implementasinya. Diantara ayat yang menjelaskan pengetasan kemiskinan ialah terdapat pada QS. Al-Kahfi ayat 79 yang berbunyi:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: *“Adapun perahu, maka ia adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku ingin menjadikannya memiliki cela karena di balik sana ada raja mengambil perahu secara paksa”*. (QS Al -Kahfi: 79)

Ayat di atas menggambarkan keadaan orang-orang miskin yang tak diam. Mereka berusaha dengan mencari karunia Allah Swt yang tersebar di lautan luas. Usaha dan upaya mereka mengantarkan pada keberhasilan memperoleh harta untuk menutupi kebutuhan mereka. Meskipun hasil yang mereka peroleh tak sebanding dengan kebutuhan yang mereka miliki. Keadaan mereka yang serba kekurangan akan lebih parah lagi jika alat satu-satunya untuk bergerak (usaha) yang mereka miliki dirampas penguasa lain. Penguasa lain tidak hanya menyebabkan kemiskinan, lebih dari itu ia telah berlaku dzhalim dengan

merampas hak-hak orang lain, karena itu kemiskinan tidak hanya bergantung pada individu atau kelompok tertentu, melainkan ia juga dipengaruhi oleh struktur sosial, termasuk didalamnya perilaku kepemimpinan.

Dapat disimpulkan, efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa terhadap penanggulangan kemiskinan menurut perspektif Ekonomi Islam ialah belum memenuhi syarat keadilan dimana masih terdapat kendala dalam penyaluran bagi masyarakat/calon penerima bantuan sehingga berdampak tidak pemerataan dalam penyaluran bantuan.

4.2.3. Upaya Pemerintah untuk Keberhasilan Program Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa

Upaya pemerintah dalam menjamin keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan memerlukan berbagai aspek dan strategi yang terkoordinasi dengan baik.

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua konsep kunci dalam konteks pemerintahan dan manajemen organisasi yang memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan efisiensi. Transparansi mengacu pada tingkat keterbukaan dan keterlihatan informasi yang dimiliki oleh suatu entitas, terutama pemerintah atau organisasi. Dalam konteks transparansi, entitas tersebut secara jelas dan terbuka membagikan informasi kepada publik, termasuk kebijakan, keputusan, dan data keuangan. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Pemerintah atau organisasi yang akuntabel bertanggung

jawab kepada pemangku kepentingan, baik itu masyarakat umum atau pemegang saham, dan biasanya melibatkan proses evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja atau penggunaan sumber daya. Kombinasi transparansi dan akuntabilitas menciptakan lingkungan di mana keputusan dan tindakan dapat diawasi secara efektif, meningkatkan integritas dan membangun kepercayaan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurul Fazri Staf Tetap Dinas Sosial Kota Langsa juga menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini upaya pemerintah untuk keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan adalah diantaranya transparansi terkait informasi yang diberikan kepada masyarakat diantaranya kebijakan, keputusan, dan data keuangan. Selanjutnya akuntabilitas dimana pemerintah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil”.⁶⁸

Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan program bantuan sosial sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui dua aspek utama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi, yang mencakup penyediaan informasi yang jelas terkait kebijakan, keputusan dan data keuangan kepada masyarakat, membantu membuka akses pemahaman dan evaluasi publik terhadap program tersebut. Dengan memperkuat aspek transparansi ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial. Di sisi lain, akuntabilitas memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewajiban dan tanggung

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Nurul Fazri Staf Tetap Dinas Sosial Kota Langsa pada 21 Desember 2023.

jawabnya secara efektif, bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan program. Kombinasi dari kedua aspek ini dapat menciptakan dasar yang kuat untuk pengelolaan program bantuan sosial yang efisien, mengoptimalkan dampak positifnya dalam mengatasi masalah kemiskinan.

b. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses sistematis dan objektif untuk mengukur dan menilai suatu kegiatan, program atau kebijakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya. Evaluasi dapat mencakup analisis kinerja, dampak, keberlanjutan dan relevansi suatu inisiatif atau kebijakan. Tujuan utama evaluasi adalah memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, pelaksana program dan masyarakat umum, agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait perbaikan, perubahan, atau pengembangan lanjutan dari suatu kegiatan atau program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Audia Mahdong Pendamping PKH Dinas Sosial Kota Langsa menjelaskan bahwa:

“Upaya pemerintah untuk keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan adalah diantaranya transparansi terkait informasi yang diberikan kepada masyarakat dan akuntabilitas dimana pemerintah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak program bantuan sosial agar pemerintah dapat mengukur efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Penilaian ini dapat mencakup aspek seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima, peningkatan akses

pendidikan dan layanan kesehatan, serta perkembangan ekonomi yang dapat diukur secara konkret”.⁶⁹

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Munawir Staf Kantor Dinas Sosial Kota Langsa menyatakan bahwa:

“Upaya pemerintah untuk keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa sejauh ini pemerintah telah melakukan upaya dengan transparansi terkait informasi yang diberikan kepada masyarakat dan akuntabilitas dimana pemerintah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak program bantuan sosial agar pemerintah dapat mengukur efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan”.⁷⁰

Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam mencapai keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa menunjukkan adanya komitmen untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Langkah-langkah transparansi terkait informasi program yang diungkapkan kepada masyarakat, seperti kebijakan, keputusan dan data keuangan, telah membangun dasar yang kuat untuk keterbukaan dan kepercayaan. Akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya juga merupakan faktor krusial dalam memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan diambil dengan pertanggungjawaban yang baik. Selanjutnya, evaluasi secara berkala terhadap dampak program bantuan sosial menunjukkan komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitasnya. Melalui siklus evaluasi ini,

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Audia Mahdong Pendamping PKH Dinas Sosial Kota Langsa pada 21 Desember 2023.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Munawir Staf Kantor Dinas Sosial Kota Langsa pada 21 Desember 2023.

pemerintah dapat terus memonitor dan menyesuaikan strategi penanggulangan kemiskinan, menciptakan dasar yang dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Langsa secara berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa adalah melakukan upaya transparansi terkait informasi yang diberikan kepada masyarakat dan akuntabilitas dimana pemerintah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak program bantuan sosial agar pemerintah dapat mengukur efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan bentuk program bantuan sosial yang diterapkan di Kota Langsa, seperti PKH, BLTDD, PIP, BPNT, dan JKN, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima, termasuk identitas yang jelas, domisili di Langsa dan kondisi ekonomi menengah ke bawah, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan telah mengambil langkah-langkah yang terstruktur dan terukur.

Namun demikian, evaluasi terhadap efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa dari perspektif Ekonomi Islam menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksetaraan dalam penyaluran bantuan yang dapat menghambat pemerataan manfaat bagi masyarakat penerima. Hal ini menandakan bahwa ada ruang untuk

peningkatan dalam sistem distribusi dan penyaluran bantuan sosial agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam perspektif Ekonomi Islam.

Pemerintah Kota Langsa telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Upaya transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan praktik akuntabilitas yang kuat menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa program tersebut dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.

Selain itu, adanya evaluasi secara berkala terhadap dampak program bantuan sosial menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya pengukuran efektivitas dan kesiapan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Hal ini mencerminkan sikap responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam dinamika kemiskinan dan kebutuhan masyarakat.

Meskipun masih terdapat kendala dan tantangan yang perlu diatasi, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kota Langsa menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial. Dengan adanya kesadaran akan kebutuhan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan, diharapkan program-program tersebut dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa adalah berupa PKH, BLTDD, PIP, BPNT dan JKN. Program-program tersebut dicairkan dengan prosedur masing-masing. Selain itu yang menjadi kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial harus mempunyai identitas yang jelas dan berdomisili di Langsa, keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dan terendah di daerah pelaksanaan.
2. Efektivitas program bantuan sosial di Kota Langsa terhadap penanggulangan kemiskinan menurut perspektif Ekonomi Islam ialah belum memenuhi syarat keadilan dimana masih terdapat kendala dalam penyaluran bagi masyarakat/calon penerima bantuan sehingga berdampak tidak pemerataan dalam penyaluran bantuan.
3. Upaya pemerintah untuk keberhasilan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa adalah melakukan upaya transparansi terkait informasi yang diberikan kepada masyarakat dan akuntabilitas dimana pemerintah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak

program bantuan sosial agar pemerintah dapat mengukur efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

5.2. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah meningkatkan validasi data penerima bantuan sosial secara berkala dan melakukan upaya untuk memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan benar-benar akurat dan menggambarkan kondisi ekonomi serta kebutuhan penerima.
2. Pemerintah melakukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat terkait kriteria penerimaan bantuan, tujuan program dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses penyaluran bantuan dapat meningkatkan pemahaman dan respons yang lebih positif dari penerima bantuan.
3. Pemerintah menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan terbuka untuk melihat dan menilai kinerja program bantuan sosial secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, *Efektifitas Penyelenggaraan Publik*. Jakarta: Media Massa, 2013.
- Abdul Manan, Muhammad. *Teori dan Prakteik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017.
- Ariyanto, Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Anisa Rahim, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di nagari Silayang kecamatan mapat tunggul selatan kabupaten Pasaman* (Skripsi: STIPAN, 2020).
- Beik, Irfan Syauqi. *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Chapra, M. Umar. *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Cing Latupono, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Pelauw* (Skripsi: IAIN Ambon, 2020).
- Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin”. *Jurnal (Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, 2023*.
- Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”. *Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02* (Februari 2020).
- Djam’an Satori dan Aan komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Rafika, 2014.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016.
- Guyatul Husna, *Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuin Besar ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

- Hasan, M.Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Khomsan, Ali. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Media, 2012.
- Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Kementerian Sosial RI, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017.
- Kartiawati, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Inten, 2017).
- Lapananda, Yusran. *Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- M. Steers, Richard. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Mudrajat Kuncoro, "Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan Tarigan, Azhari Akmal. *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Muhammad Iqbal, *Konsep Pengentasan Kemis Kinan dalam Ekonomi Islam* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Nunung Nuewati, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan". Jurnal (Kependudukan Padjadjaran 2018 Vol. 10, No. 1).
- Rahayu, Sri Lestari. *Bantuan Sosial di Indonesia*. Bandung: Fokus Media 2012.
- Sauqy, Irfan. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Sajogyo, *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Yogyakarta: Adytia Media, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabetha, 2016.
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI, 2016.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 2017.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2014.

- Tina Regina Sari, *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Tiumbang Kec. Tiumbang Kab. Dharmasraya)* (Skripsi: UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, 2022).
- Qardawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2015.